

Suap Pailit di Kamus Inggris

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan hakim agung Sudrajad Dimiyati dalam kasus suap senilai Rp 2,2 miliar. Melibatkan panitera dan staf Mahkamah Agung.

EMPAT penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah Desy Yustria di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis dinihari, 22 September lalu. Anggota staf kepanteraan Mahkamah Agung itu tak berkulit ketika personel komisi antirasuah menyodorkan surat perintah penggeledahan. Desy menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) setelah KPK menangkap dua tersangka pemberi suap yang melibatkan hakim agung Sudrajad Dimiyati.

Pengeledahan yang berakhir menjelang pagi itu menemukan bukti penting berupa uang sebesar Sin\$ 205 ribu atau sekitar Rp 2,15 miliar. Tim penyidik menemukannya dalam sebuah kotak penyimpanan, sekilas menyerupai kamus setebal tujuh sentimeter.

Tapi itu hanya kamuflase. "Luar biasa ini, *the new English dictionary*. Buku tapi di dalamnya ada uang," ujar Ketua KPK Firli Bahuri ketika menyampaikan keterangan pers tentang suap hakim agung pada Kamis malam, 22 September lalu.

Uang tersebut diperoleh Desy dari Eko Suparno, pengacara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, di sebuah hotel di Bekasi, sehari sebelumnya. Eko ditangkap bersama rekannya, Yosep Parera, pada Rabu, 21 September lalu, tak lama setelah pulang ke Semarang, Jawa Tengah.

Tim penyidik juga menciduk lima orang lain secara terpisah. Dari kesaksian delapan orang itu, Firli menjelaskan, KPK menetapkan status tersangka terhadap sepuluh orang. KPK turut menyita uang Rp 50 juta dari para tersangka sehingga total uang menjadi Rp 2,2 miliar.

KPK juga menetapkan status tersangka kepada tiga anggota staf Mahkamah Agung, yakni Muhajir Habibie, Nurmanto Akmal, dan Albasri. Uang suap itu disebut

akan dibagikan kepada hakim agung Sudrajad Dimiyati dan seorang hakim yustisial, Elly Tri Pangestu. KPK menahan keduanya sehari kemudian, Kamis, 22 September lalu.

Selain Eko dan Yosep, KPK menetapkan Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya adalah debitor KSP Intidana sekaligus klien Eko dan Yosep.

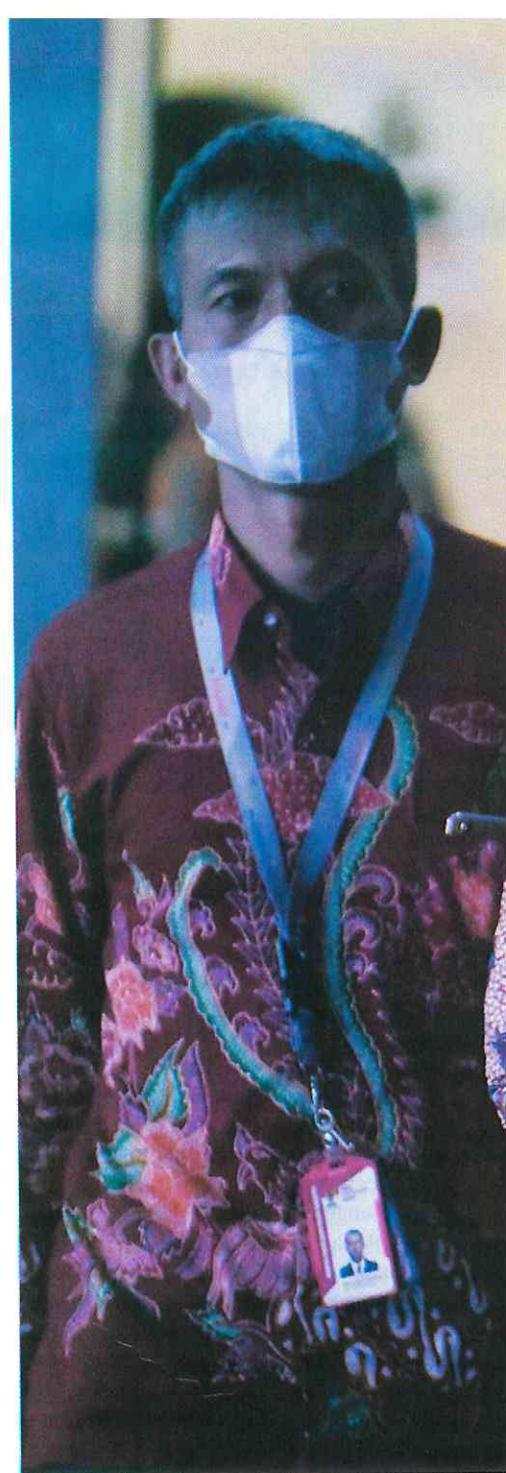
Suap yang berasal dari Tanaka dan Ivan diduga sebagai uang "terima kasih" untuk perkara yang berkaitan dengan KSP Intidana di Mahkamah Agung. Tanaka dan Ivan tengah bersengketa dengan KSP Intidana. Mereka melaporkan sejumlah perkara, di antaranya pemailitan KSP Intidana, ke pengadilan.

Kasasi kasus pemailitan sudah diputus Mahkamah Agung pada 31 Mei lalu. Sudrajad Dimiyati adalah ketua majelis hakim kasasi tersebut. Putusan itu mengabulkan gugatan pailit Tanaka dan Ivan. Saat ini kasus tersebut memasuki proses peninjauan kembali.

Tanaka dan Ivan meminta Yosep dan Eko mengurus penanganan perkara itu di Mahkamah Agung. Keduanya bertemu dengan Desy di Mahkamah Agung. Desy mengajak Muhajir Habibie dan Elly Tri Pangestu menjadi penghubung kepada majelis kasasi. "Desy merupakan representasi Dimiyati," tutur Firli.

Dimiyati tak langsung ditahan saat KPK menggelar OTT. Ia menyerahkan diri pada Jumat, 23 September lalu, setelah berkonsultasi dengan koleganya. "Sebelum mendatangi KPK, beliau sempat mendatangi gedung MA menanyakan respons dan restu dari rekan-rekan sesama hakim," ujar juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro.

Andi Samsan enggan mengo-

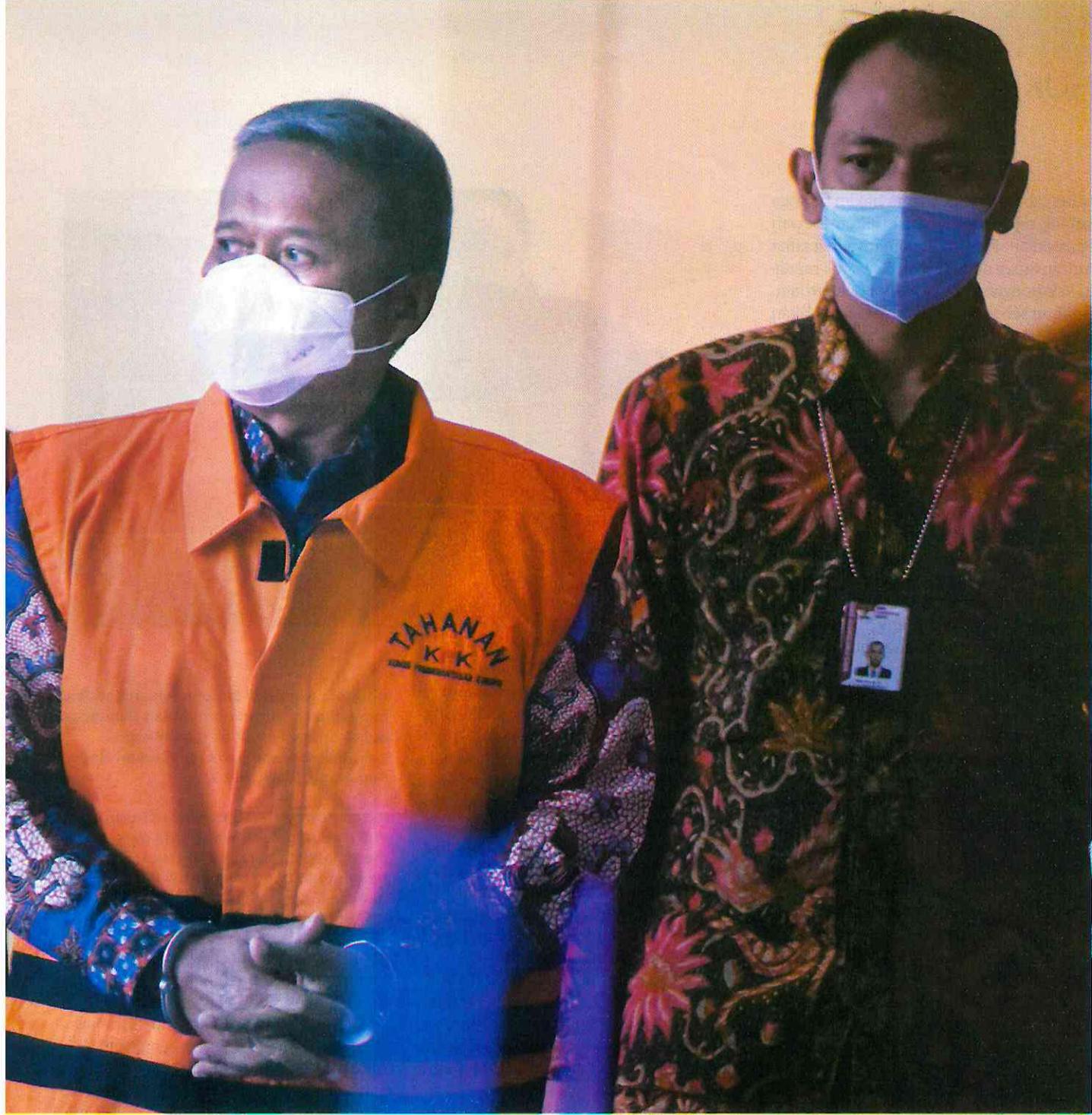


Hakim agung Sudrajad Dimiyati resmi memakai rompi tahanan se usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 23 September 2022.

mentari perkara yang tengah membelit Dimiyati dan lima anggota staf MA lain. Ia menjamin Mahkamah Agung bakal kooperatif dan membantu penyidikan kasus suap tersebut.

Selepas menerima restu pimpinan Mahkamah Agung,





KPK menggeledah beberapa ruangan pada Jumat, 23 September lalu. Di antaranya ruang kerja Dimiyati, ruangan hakim agung Takdir Rahmadi, dan ruangan anggota staf Gazalba Saleh, yang juga hakim agung. Pengeledahan berlanjut pada Senin dan Selasa, 26 dan 27 September lalu, termasuk di rumah Dimiyati.

Gazalba adalah hakim kasasi yang menghukum Ketua KSP Intidana Budiman Gandhi Suparman lima tahun penjara dalam kasus pemalsuan akta autentik. Sementara itu, Takdir adalah hakim yang ditunjuk menangani peninjauan kembali putusan kasasi yang memailitkan KSP

Intidana. Berdasarkan register perkara, Takdir ditunjuk pada 21 September lalu atau persis pada hari penangkapan pengacara KSP Intidana.

Kuasa hukum Yosep Parera dan Eko Suparman, Luhut Sagala, menyatakan kliennya mengaku bersalah dan siap dihukum seberat-beratnya. Yosep dan Eko mengklaim tak pernah mengenal Dimiyati atau hakim agung lain yang menangani perkara Intidana.

Selama pengurusan kasus itu, Luhut menambahkan, keduanya hanya menjalin komunikasi dengan Desy, anggota staf Mahkamah Agung. "Desy akrab dise-

but orang kepercayaan sejumlah hakim agung," ucap Luhut.

Lewat keterangan tertulis, Yosep menyatakan kasus yang menjeratnya adalah momentum menyuarakan kritik terhadap penegakan hukum. Selama ini, menurut dia, masyarakat kecil banyak yang sulit mendapat akses keadilan.

Mereka kerap berhadapan dengan tembok tebal. Ia berharap kasus ini bisa membuka mata, telinga, dan hati para penegak hukum. "Peristiwa ini bukan malapetaka bagi saya," katanya.

Dimiyati adalah hakim agung yang pertama kali terjerat operasi tangkap tangan.

Ia bergabung dalam jajaran hakim bertoga kuning sejak 2014. Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat memilihnya bersama Amran Suadi dan Puwosusilo untuk mengisi kekosongan kursi hakim kamar perdata. Setahun sebelumnya, ia ikut mencalonkan diri, tapi kandas akibat skandal suap.

Dugaan suap menyeruak ketika Dimiyati bertemu dengan anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Bahrudin Nashori, di toilet gedung DPR. Seorang jurnalis melihatnya memberikan amplop kepada Bahrudin di sela-sela proses uji kepatutan dan kelayakan. Kasus itu sempat ditilik Komisi Yudisial, meski kandas akibat minimnya alat bukti.

Kini, di tengah penyidikan KPK, Komisi Yudisial kembali bergerak. Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Dimiyati. Penyelidikan kasus itu ditangani bersama Mahkamah Agung.

Jika ditemukan cukup unsur untuk menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat, menurut Mukti, Komisi Yudisial bakal mengajak Mahkamah Agung menggelar sidang Majelis Kehormatan Dewan. "Kasus ini mencederai kehormatan dan keluhuran martabat hakim," ujarnya.

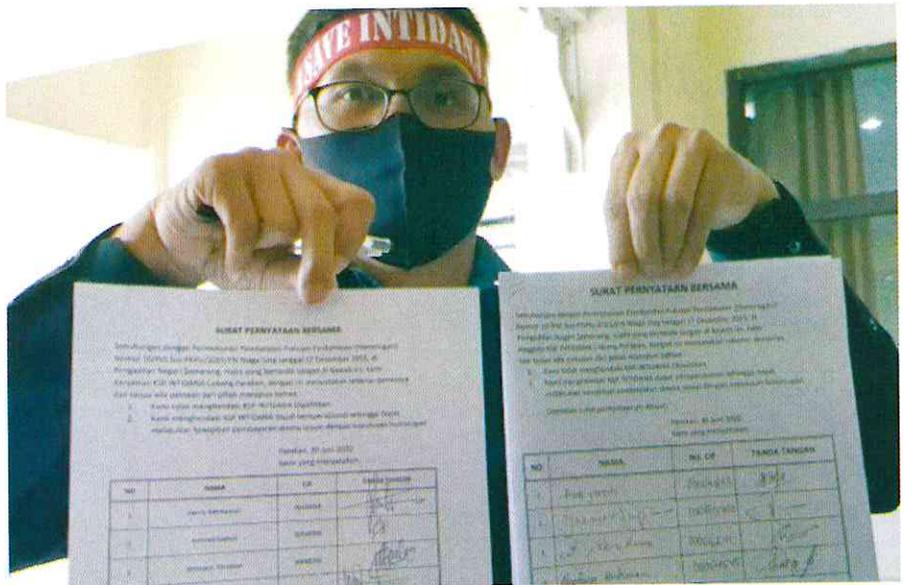
Penangkapan Dimiyati menambah panjang daftar kasus suap yang menyeret "wakil Tuhan". Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya ada 26 hakim yang terseret kasus pidana suap sejak 2012.

Praktik itu umumnya melibatkan anggota staf sebagai penghubung. "Penyelesaian bawah tangan terkadang banyak tak terendus. Apalagi jika itu dilakukan di luar negeri. Sulit bagi KPK melakukan OTT," kata peneliti ICW, Lalola Ester.

...

KASUS yang menyeret hakim agung Sudrajad Dimiyati berawal dari permohonan pembatalan akta perdamaian (homologasi) yang diajukan sepuluh deponan Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Mereka meminta hakim kasasi menganulir putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menolak permohonan gugatan karena dianggap prematur. Gugatan yang diajukan pada Januari lalu itu dianggap menyalahi akta homologasi yang dibuat pada 7 Desember 2015.

Direktori putusan Nomor 1/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022 menye-



butkan akta perdamaian itu masih berlaku. Hakim Suwanto yang memimpin sidang menolak permohonan pailit karena Intidana dianggap masih memiliki iktikad baik untuk mengembalikan dana para anggota. Pengembalian hak para deponan pemilik dana di atas Rp 50 juta dilakukan sejak 2021 selama lima tahun.

Putusan itu dianulir majelis hakim kasasi yang dipimpin Dimiyati. Rapat musyawarah hakim kasasi tertanggal 31 Mei 2022 mengabulkan permohonan untuk membatalkan akta perdamaian (homologasi) dan menyatakan Intidana pailit.

Dalam putusan perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, semua aset Intidana berada dalam penguasaan tim kurator. Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto adalah dua dari sepuluh deponan yang mengajukan gugatan ini.

Belakangan, terungkap putusan itu adalah pesanan. Tanaka dan Ivan membujuk para hakim dengan iming-iming Sin\$ 202 ribu. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengatakan pembagian itu disepakati Rp 250 juta untuk Desy Yustria.

Muhajir Habibie menerima jatah sebesar Rp 850 juta dan Elly Tri Pangestu Rp 100 juta. Elly juga menerima sekitar Rp 800 juta untuk diserahkan kepada Dimiyati. Hingga awal Oktober lalu, Dimiyati belum menunjuk pengacara.

Polemik yang menyeret KSP Intidana punya riwayat panjang sejak 2015. Ketika itu kondisi keuangan KSP Intidana sempat oleng akibat penarikan uang dalam jumlah besar. Puluhan ribu deponan berbon-

Anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana menunjukkan surat pernyataan dukungan agar koperasi itu tidak dipailitkan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, 2 Juli 2020.

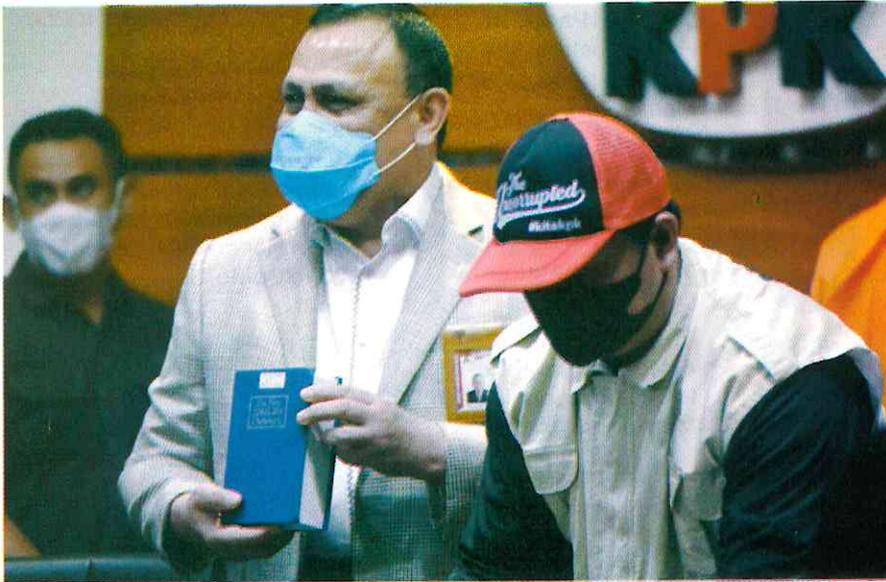
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri bersama anggota penyidik menunjukkan barang bukti kotak penyimpanan uang berbentuk kamus bahasa Inggris di gedung KPK, Jakarta, 23 September 2022 (kanan).

dong-bondong menarik simpanan setelah mengetahui skandal penggelapan uang Rp 5 miliar oleh salah seorang pengurus KSP Intidana Wonokromo, Surabaya. "Sempat terjadi *rush*," ujar pengacara KSP Intidana, Wahyu Rudy Indarto.

Intidana awalnya sebuah koperasi sehat yang mengelola dana sekitar Rp 900 miliar. Total anggotanya mencapai 44 ribu orang. Penarikan uang itu membuat Intidana limbung dan sempat berada dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Wahyu mengklaim kewajiban pengembalian dana masih dilakukan setelah berjalannya skema kesepakatan homologasi. "Skema 1-3 sudah kami bayarkan semua. Skema 4 masih berjalan," tuturnya.

Di tengah sengkabut itu, Ketua KSP Intidana Handoko berhasil meyakinkan pengusaha Heryanto Tanaka untuk menamakan uangnya. Total uang yang ia setor sebesar Rp 45 miliar. Tanaka tertarik akan skema keuntungan deposito berjangka.



Namun, ketika jatuh tempo, cek yang diserahkan Intidana tak bisa dicairkan. Setiap cek tertanggal 1 Juli 2022 bernilai Rp 11 miliar dan cek tertanggal 6 Juli 2022 bernilai Rp 16 miliar.

Kuasa hukum Tanaka, Petrus Selestinus, menyebutkan kliennya merasa ditiptu karena baru menyadari persoalan keuangan Intidana di kemudian hari. Ia sempat bernegosiasi dengan Handoko yang berujung penyerahan 40 sertifikat tanah dan bangunan aset KSP Intidana. Sertifikat itu dijadikan jaminan. Namun ketidakjelasan pengembalian dana mendorong Tanaka melaporkan Handoko ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Di tengah proses penyidikan, Petrus menambahkan, sejumlah anggota melayangkan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Namun gugatan itu dicabut lantaran pengurus KSP Intidana menjalin akta perdamaian dengan para anggotanya. Perjanjian tertanggal 7 Desember 2015 itu menyepakati skema pengembalian dana dalam jangka waktu lima tahun tanpa bunga.

Dalam akta disebutkan pengembalian dana pada tahun pertama (2016-2017) dialokasikan bagi anggota yang memiliki simpanan Rp 5 juta, 2017-2018 untuk pemilik dana Rp 5-10 juta, 2018-2019 untuk pemilik dana Rp 10-25 juta, dan 2019-2020 bagi pemilik dana Rp 25 juta-50 juta. Ada juga untuk tahun terakhir (2020-2021) bagi pemilik simpanan Rp 50 juta ke atas. Dalam akta juga disebutkan Handoko tetap

mengurus KSP hingga Januari 2021.

Ketika itu Handoko baru saja dijatuhi vonis dua tahun enam bulan penjara. Hukumannya diperberat di tingkat kasasi menjadi empat tahun penjara. Di tengah hukuman itu, Budiman Gandi Suparman menggelar rapat umum luar biasa pada 27 Februari 2016.

Budiman diangkat sebagai Ketua KSP Intidana menggantikan Handoko. Tapi Tanaka menolak putusan itu. "Akta homologasi menetapkan Handoko sebagai ketua hingga 2021," ujar Petrus.

Kisruh kepengurusan ganda membuat Tanaka melaporkan Budiman ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI atas tuduhan pemalsuan akta. Putusan yang berlanjut hingga kasasi itu berujung sanksi bui selama lima tahun untuk Budiman. "Putusan itu sudah kami jalankan. Budiman menyerahkan diri pada 8 September 2022 dan langsung kami eksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kedungpane, Semarang," tutur Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Emy Munfarida.

Emy menyampaikan Kejaksaan sudah menemui Budiman untuk membicarakan penguasaan 40 sertifikat yang tengah berada dalam penyitaan jaksa. Sebab, putusan berkas perkara 326 K/Pid/2022 menyatakan barang bukti itu harus dikembalikan kepada KSP Intidana melalui Budiman. "Barang bukti itu akan kami kembalikan dengan disaksikan pihak koperasi. Demi prinsip kehati-hatian," katanya.

RIKY FERDIANTO, SYAFWAN THAARIQ, ROSSENO AJI, JAMAL ABDUN NASHR (SEMARANG)

JEJAK SKANDAL WAKIL TUHAN

KASUS korupsi yang menjerat hakim tak pernah berhenti selama satu dekade ini, dari tingkat pengadilan negeri, Mahkamah Konstitusi, hingga Mahkamah Agung.

17 Agustus 2012

▼ Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim *ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Kartini Julianna Mandalena Marpaung. Ia menerima suap Rp 150 juta terkait dengan kasus biaya perawatan mobil dinas di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

22 Maret 2013

▼ KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono dalam operasi tangkap tangan. Ia diduga menerima uang Rp 150 juta dalam kasus anggaran bantuan sosial Kota Bandung.

2 Oktober 2013

▼ KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam kasus penerimaan suap sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton, Kalimantan Tengah.

10 Juli 2015

▼ Tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tripeni Irianto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, terseret kasus suap perkara uji kewenangan penyelidikan kasus bantuan sosial.

24 Mei 2016

▼ Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Janner Purba ditahan dalam suap penanganan kasus korupsi Rumah Sakit M. Yunus, Bengkulu. Kasus ini juga menyeret hakim di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, Toton.

BESEL HAKIM AGUNG

SUAP untuk hakim agung Sudrajad Dimiyati berawal dari sengketa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Pada 2015, nasabah KSP Intidana menarik uang secara besar-besaran (*rush*) sehingga keuangan koperasi kolaps. Sengketa berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Di tahap ini, pihak penggugat diduga membagi-bagikan besel kepada para panitera, termasuk Sudrajad. Kasus korupsi hakim agung pertama yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

TERSANGKA

PENERIMA SUAP

1. Sudrajad Dimiyati, 64 tahun
Peran: Menerima suap Rp 800 juta

Karier:

- » Hakim agung kamar perdata sejak 2014
- » Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Jawa Tengah; Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara; dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

CATATAN: PADA 2013 GAGAL MENJADI HAKIM AGUNG KARENA SKANDAL SUAP DI TOILET GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.



2. Elly Tri Pangestu
 Hakim yustisial/
 panitera pengganti
 Mahkamah Agung



3. Desy Yustria
 Pegawai negeri sipil
 pada kepaniteraaran
 Mahkamah Agung



4. Muhajir Habibie
 PNS pada kepaniteraaran
 Mahkamah Agung

5. Nurmanto Akmal
 PNS Mahkamah Agung

6. Albasri
 PNS Mahkamah Agung

PEMBERI SUAP



1. Yosep Parera,
 pengacara

2. Eko Suparno,
 pengacara

3. Heryanto Tanaka, swasta/
 debitor Koperasi
 Simpan Pinjam
 Intidana

4. Ivan Dwi Kusuma Sujanto,
 swasta/debitor
 Koperasi Simpan
 Pinjam Intidana

BERAWAL DARI SENGKETA INVESTASI

2015. Terjadi penarikan uang secara besar-besaran di sejumlah kantor Koperasi Simpan Pinjam Intidana akibat penggelapan uang sebesar Rp 5 miliar di KSP Intidana Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.



Kantor Koperasi Simpan-Pinjam Intidana, Jalan Setiabudi, Semarang, 23 September 2022.

18-28 Mei 2015. Heryanto Tanaka menyimpan dana sebesar Rp 45 miliar yang disetor secara bertahap kepada KSP Intidana di Semarang, Jawa Tengah.

1-6 Juli 2015. Pencairan dana milik Tanaka yang jatuh tempo sebesar Rp 11 miliar dan Rp 16 miliar tak bisa dilakukan. KSP Intidana lalu menyerahkan 40 sertifikat tanah dan bangunan sebagai jaminan.

30 Agustus 2015. Heryanto Tanaka melaporkan Ketua KSP Intidana Handoko ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas dugaan penipuan.

3 September 2015. Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang KSP Intidana.

7 Desember 2015. Kreditor dan debitor KSP Intidana menyepakati akta



perdamaian ihwal pengembalian dana dalam jangka waktu lima tahun tanpa bunga. Handoko tetap diminta mengurus KSP hingga Januari 2021.

17 Desember 2015. Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan sah perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam akta tertanggal 7 Desember 2015.

27 Februari 2016. Rapat anggota khusus mengangkat Budiman Gandhi Suparman sebagai Ketua Umum KSP Intidana. Heryanto Tanaka menolak perombakan pengurus.

16 Desember 2016. Putusan permohonan kasasi menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Ketua KSP Intidana Handoko. Ia dinyatakan bersalah lantaran menipu nasabah.

30 September 2019. Heryanto Tanaka melaporkan Budiman Gandhi Suparman ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI atas tuduhan pemalsuan keterangan dalam akta perombakan pengurus KSP Intidana.

6 Oktober 2020. Hakim kasasi menolak permohonan pembatalan akta perdamaian (homologasi) yang diajukan enam deponan KSP Intidana. Gugatan itu dianggap prematur.

21 Januari 2021. Sepuluh anggota KSP Intidana mengajukan permohonan pembatalan akta perdamaian yang dibuat pada 7 Desember 2015 ke pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

22 Maret 2022. Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan pembatalan akta perdamaian yang diajukan sepuluh deponan KSP Intidana karena dianggap prematur.

4 April 2022. Putusan kasasi

menyatakan Budiman Gandhi bersalah dalam kasus pemalsuan akta autentik. Ia dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

31 Mei 2022. Musyawarah majelis kasasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pembatalan akta perdamaian (homologasi) yang diajukan sepuluh deponan KSP Intidana. Intidana dinyatakan pailit.

21 September 2022. Kuasa hukum penggugat, Yosep Parera dan Eko Suparno, menyerahkan uang Sin\$ 205 ribu dan Rp 50 juta kepada Desy di Bekasi, Jawa Barat. Desy lalu membagikan uang kepada sejumlah rekannya.



Kantor pengacara Yosep Parera di Semarang, 28 September 2022.

22 September 2022. Pada dinihari, Komisi Pemberantasan Korupsi menciduk Desy di rumahnya beserta barang bukti uang Sin\$ 205 ribu dan Rp 50 juta. Tim penyidik juga menangkap pengacara Intidana, Yosep Parera dan Eko Suparno, di Semarang.

23 September 2022

- » KPK menahan hakim agung Sudrajad Dimiyati.
- » Penyidik menggeledah ruang kerja Sudrajad dan hakim agung lain, Takdir Rahmadi.

NASKAH: RIKY FERDIANTO, HADI MULYANA, SYAFWAN THAARIQ. **SUMBER:** DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, PUSAT DATA DAN ANALISA TEMPO. **FOTO:** TEMPO/DIAN TRIYULI HANDOKO (DIMYATI), TEMPO/IMAM SUKAMTO (ELLY, DESY, YOSEP), FACEBOOK.COM/MUHAJIR HABIBIE (MUHAJIR), AFZAL NUR IMAN/DETIKJATENG (INTIDANA), ANGLING ADHITYA PURBAYA/DETIKJATENG (KANTOR PENGACARA), ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA (NGANRO)

25 Januari 2017

▼ Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, ditangkap KPK dalam kasus dugaan penerimaan suap perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

6 Oktober 2017

▼ KPK menangkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dan seorang anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Aditya Anugerah Moha.

13 Maret 2018

▼ KPK menangkap hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Wahyu Widya Nurfitri, dalam kasus dugaan pemenangan perkara perdata.

28 Agustus 2018

▼ KPK menahan hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Medan dalam perkara penerimaan hadiah atau janji sebesar Sin\$ 150 ribu.

26 Maret 2019

▼ KPK menangkap hakim Pengadilan Negeri Semarang, Lasito. Belakangan, ia terbukti menerima suap Rp 500 juta dan US\$ 16 ribu ketika menangani gugatan praperadilan.

“Kami di jajaran MA menyatakan prihatin atas kejadian ini.”

Juru bicara Mahkamah Agung,
Andi Samsan Nganro

